

**PROSES PEMEKARAN WILAYAH PADA ERA OTONOMI DAERAH**

**(STUDI KASUS PEMEKARAN WILAYAH KABUPATEN BURU  
SELATAN PROVINSI MALUKU TAHUN 2004-2008)**

**SKRIPSI**



**Disusun Oleh**

**Nama : Syamsul alam said**

**Nim : 20050520089**

**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

# LEMBARAN PENGESAHAN

## SKRIPSI

Dengan Judul :

Proses Pemekaran Wilayah Pada Era Otonomi Daerah

Studi Kasus Pemekaran Wilayah Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku Tahun 2004-2008

Oleh :

**Syamsul Alam Said**

**Nim. 20050520089**

Telah dipertahankan dan disahkan di depan Tim Penguji Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Pada

Hari / Tanggal : Kamis / 12 Agustus 2010

Tempat : R. Hibah

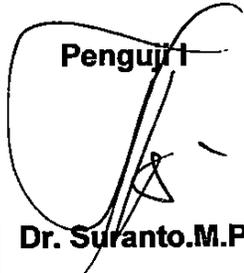
Jam : 10.00 WIB

**SUSUNAN TIM PENGUJI**

**Ketua**

  
**Dr. Ulung Pribadi.MSi.**

**Penguji I**

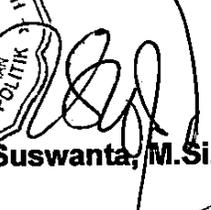
  
**Dr. Suranto.M.Pol.**

**Penguji II**

  
**Utami Dewi.S.IP.M.Pub.Pol.**

Mengetahui,

**KETUA JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN**

  
**Drs. Suswanta, M.Si.**



## **SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Syamsul Alam Said  
Nomor Mahasiswa : 20050520089  
Fakultas : ISIPOL  
Jurusan : Ilmu Pemerintahan  
Judul Skripsi : Proses Pemekaran Wilayah Pada Era Otonomi Daerah Studi Kasus  
Pemekaran Wilayah Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku  
Tahun 2004-2008

Dengan ini menyatakan skripsi yang saya buat benar-benar hasil karya sendiri, dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada suatu perguruan tinggi manapun. Sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya pendapat orang lain yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Selanjutnya apabila dikemudian hari terdapat duplikasi dan ada pihak yang merasa dirugikan dan menuntut, maka saya akan bertanggung jawab dan menerima segala konsekuensinya serta memuntahkannya.

## MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ﴿٧﴾

*Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguhnya (urusan)*

*yang lain. (Q.S. Alam Nasyrat 6-7)*

1

*"hidup memberikan kenikmatan yang luar biasa ketika kita mampu mengatasi segala kesulitan, melewati berbagai hambatan, memiliki harapan, harapan baru"*

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Kupersembahkan karyaku ini untuk orang-orang yang berarti dalam hidupku yang sangat akau cintai dan sayangi,*

*Bapak dan ibuku, yang selalu berusaha memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya, Nanda juga akan selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk Bapak dan Ibu tersayang.*

*Kakak-kakku yang sangat aku banggakan, satu hal yang paling berarti dalam hidup kita adalah membahagiakan kedua orang tua kita.*

*Nurlela said (Calon Istiku), yang selama ini menjadi teman, sahabat dan kekasihku, semoga allah mewujudkan semua harapan kita, dan memberikan yang terbaik untuk kita berdua amin*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur kepada sumber dari suara-suara hati yang bersifat mulia, sumber ilmu pengetahuan, sumber segala kebenaran, Sang Maha Cahaya, Penabur cahaya Ilham, Pilar nalar kebenaran dan kebaikan yang terindah, Sang Kekasih tercinta yang tak terbatas pencahayaan cinta-Nya bagi umat-Nya, Allah Subhana Wa ta'ala, karena atas ijin-Nya penyusun dapat menyelesaikan Skripsi ini Dengan judul **“Proses Pemekaran Wilayah Pada Era Otonomi Daerah Studi Kasus Pemekaran Wilayah Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku Tahun 2004-2008”**.

Shalawat serta salam teruntuk Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan dan menyatakan kepada kita semua ajaran Rukun Iman dan Rukun Islam yang telah terbukti kebenarannya, dan semakin terus terbukti kebenarannya.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan disana-sini. Meskipun demikian penyusun skripsi ini terbuka atas kiritik dan saran yang membangun dari para pembaca.

Pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan dan dorongan baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Dan tak lupa penyusun ingin menyampaikan rasa terima kasih kepad :

1. Bapak Dr. H. Achmad Nurmandi, MSc. Sebagai Dekan FISIPOL Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Drs. Suswanta, M.Si. Selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan
3. Dian Eka Rahmawati, SAP. M.si. Selaku Sekertaris Jurusan Ilmu Pemerintahan.
4. Dr. Ulung Pribadi, M.Si, sebagai Dosen Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan serta petunjuk kepada penulis dalam penulis dalam penulisan skripsi ini.
5. Dr. Suranto. M.Pol. Terimah kasih telah melungkan waktu sebagai untuk menguji proposal skripsi dan sebagai penguji I.
6. Utami Dewi.S.IP.M.Pub.Pol. teimah kasih telah meluangkan waktu sebagai penguji II.
7. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas ISIPOL Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah mendidik dan mengajari penulis selama menempuh perkuliahan.
8. Seluruh kartawan dan karyawati Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah memberikan bantuan dan partisipasinya sehubungan dengan penyusun skripsi penulis.
9. Seluruh Kawan-Kawan Seperjuangan di Forum Solidaritas Mahasiswa Untuk Demokrasi (FOSMAD) yang telah mendidik dan membimbing saya terutama senior-senior...

- Bang Darul, Bang Indra Lesang, Bang Leo, Bang Ojeng, Bang Hardian, Bang Dewa, Bang Sardi, Bang Ucok.
10. Seluruh Kawan-Kawan Seperjuangan di Himpunan Mahasiswa Islam komisariat Tunas Bangsa tetap berjuang Yakin Usaha Sampai (Yakusa).
  11. Seluruh kawan-kawan seperjuangan di Himpunan Keluarga Mahasiswa Kabupaten Buru Selatan Yogyakarta, yang telah banyak memotivasi dan membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini, selamat berjuang dan tetap semangat.

Semoga amal kebaikan dan segala bimbingan serta bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapat imbalan pahala dari Allah SWT.

Akhirnya, penulis menyadari tidak ada kesempurnaan pada diri manusia, karena kesempurnaan hanya milik Allah dan hanya Allah lah yang penulis harapkan menjadikan karya karya kecil ini bermanfaat bagi semua. Amin.....

.. *Wassalamu' alaikum Wa. Wa.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMA PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xii
SINOPSIS.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Kerangka Dasar Teori.....	6
1. Otonomi Daerah.....	6
2. Pemerintah Daerah.....	14
3. Pemekaran Wilayah.....	13
D. Definisi Konseptual.....	21
E. Definisi Operasional.....	22
F. Metode Penelitian.....	23
1. Jenis Penelitian.....	24
2. Unit Analisa Penelitian.....	24
3. Lokasi Penelitian.....	24
4. Data Yang di Butuhkan.....	25
5. Tehnik Analisa Data.....	28

**BAB II DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN..... 29**

A. Gambaran Umum Kabupaten Buru.....	30
B. Gambaran Umum Kabupaten Buru Selatan.....	30
1. Keadaan Geografis.....	30
2. Keadaan Iklim.....	32
3. Jumlah Penduduk.....	33
4. Kemampuan Ekonomi.....	34
5. Potensi Daerah.....	34
a. Lembaga Keuangan.....	34
b. Sarana Ekonomi.....	35
c. Sarana Pendidikan.....	35
d. Sarana Kesehatan.....	37
e. Sarana Transportasi dan Komunikasi.....	38
f. Sarana Pariwisata.....	39
g. Ketenagakerjaan.....	40
6. Sektor – Sektor Strategis.....	40
a. Sektor Pertanian dan Tanaman Pangan.....	40
b. Sektor Perkebunan .....	41
c. Sektor Perikanan dan Kelautan.....	42
d. Sektor Sarana dan Prasarana.....	43
C. Arah dan Kebijakan Lembaga Pengembangan Buru Selatan.....	43

**BAB III PROSES PEMEKARAN WILAYAH PADA ERA OTONOMI DAERAH  
PEMEKARAN WILAYAH KABUPATEN BURU SELATAN PROVINSI  
MALUKU TAHUN 2004-2008.....45**

A.1. Ada kemauan politik dari pemerintah daerah dan masyarakat setempat...	45
A.2. Pembentukan daerah harus didukung oleh penelitian awal yang dilakukan oleh pemerintah daerah.....	52
A.3. Usulan Pemekaran Kabupaten/Kota disampaikan kepada Pemerintah cq Menteri Dalam Negri dan Otonomi Daerah.....	55
B. Peran Masyarakat sipil.....	56
C.1. Peran Bupati.....	57
C.1.a. Memberikan rekomendasi persetujuan dan mendukung rencana Pemekaran Wilayah.....	57
C.2.b. Memberikan persetujuan dan mengajukan permohonan kepada Gubernur dan Mendagri.....	59
D.2. Peran DPRD	
D.2.a. Memberikan rekomendasi dan dukungan politik.....	60
D.2.b. Membentuk Pansus (Panitia Khusus).....	61
D.2.c. Mengeluarkan surat keputusan persetujuan dan dukungan...	62
E. Peran Provinsi.....	62
- Memberikan rekomendasi dan persetujuan tentang Pemekaran Wilayah.....	62
F. Pembentukan prosedur dan persyaratan Pemekaran Wilayah.....	63
F.1. Pembentukan daerah persiapan.....	63
F.1.a. Urutan tingkat Kota/Daerah persiapan (rank) menurut besaran jumlah penduduk.....	63
F.2.b. Kemampuan ekonomi dan potensi pemerintahan asli daerah.....	65
F.3.c. Jumlah penduduk.....	66

F.4.d. Tingkat kesulitan masyarakat dalam mengakses pelayanan publik .....68

**BAB IV KESIMPULAN**.....70

A. Kesimpulan.....70

B. Saran

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Jumlah Kecamatan, Desa dan Dusun Kondisi Awal Tahun.....	31
Tabel 2.2.	Jumlah Penduduk Wilayah Kabupaten Buru Selatan Dirinci Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2003.....	33
Tabel 2.3.	Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank Kabupaten Buru Selatan.....	34
Tabel 2.4.	Sarana dan Prasarana Ekonomi Kabupaten Buru Selatan Tahun 2004.....	35
Tabel 2.5.	Jumlah Sekolah, Murid dan Guru di Wilayah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2003.....	36
Tabel 2.6.	Fasilitas Rumah Sakit, Puskesmas Dan Tenaga Kesehatan Fungsional Dalam Wilayah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2003.....	37
Tabel 2.7.	Sarana Transportasi Darat Dan Laut Kabupaten Buru Selatan Tahun 2005.....	38
Tabel 2.8.	Sarana Komunikasi Kabupaten Buru Selatan Tahun 2005.....	39
Tabel 2.9.	Ketenaga Kerjaan Di Wilayah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2005.....	40
Tabel 2.10	Jenis Tanaman, Luas Area Dan Produksi Tanaman Pangan Di Wilayah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2004.....	41
Tabel 2.11.	Luas Tanaman Dan Produksi Per-Hektar Menurut Tanaman Perkebunan.....	42
Tabel 3.1.	Jumlah Penduduk Kabupaten Buru Selatan Dirinci Menurut Kecamatan Dan Jenis Kelamin Tahun 2003.....	64

Tabel 3.2. Jumlah Penduduk Kabupaten Buru Selatan Dirinci Menurut Kecamatan Dan Jenis Kelamin Tahun 2003 67

## SINOPSIS

Sebelumnya sistem pemerintahan Indonesia bersifat sentralistik atau terpusat. Pemerintah berasumsi bahwa keadaan yang stabil dan kondusif sehingga tercipta kesejahteraan rakyat pada akibatnya nanti adalah dengan menjalankan pemerintahan dengan sistem sentralistik baik dari tingkat pusat sampai pada tingkat pemerintahan desa yang menempati pada level rendah. Ternyata yang diteorikan pemerintah dahulu itu meleset dan menemui kegagalan, sehingga pada akhirnya terjadi pergeseran pola berfikir dari pemerintah yang sentralistik menuju pola pemerintah berdasarkan sistem desentralisasi yang diberlakukan otonomi daerah sampai ketingkat desa. Perubahan sistem pemerintahan yang bersifat desentralistik ini dimulai pada era reformasi, dimana daerah diberikan kewenangan yang lebih untuk mengatur rumah tangganya sendiri melalui otonomi daerah, sesuai dengan latar belakang diatas rumusan masalah yang diteliti yaitu Bagaimanakah Proses Pemekaran Wilayah Era Otonomi Daerah di Kabupaten Buru Selatan provinsi Maluku Tahun 2004-2008?

Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, penelitian kualitatif adalah sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang yang diamati.

Sesuai dengan hasil yang diteliti salah satu faktor pendorong proses pemekaran wilayah Kabupaten Buru Selatan yaitu adanya kemauan politik yang kuat dari masyarakat dan pemerintah daerah dengan melihat kondisi daerah yang sangat membutuhkan perhatian yang khusus dari pemerintah daerah dari segi pembangunan dan pengelolaan potensi daerah yang dimilikinya sehingga hal ini tidak terlepas dari adanya penyediaan pelayanan yang layak melalui pemekaran wilayah, oleh karena itu semenjak Tahun 2004 masyarakat dalam 5 kecamatan di Kabupaten Buru Selatan sangat bersemangat dalam upaya pemekaran wilayah Buru Selatan menjadi daerah otonom, kemudian pada tanggal 20 Oktober tahun 2004 masyarakat mengusulkan Pemekaran wilayah kepada Gubernur Maluku Melalui Surat LPBS No: 04/LEM-PBS/X/04. Namun Gubernur Maluku kurang merespon pengusulan pemekaran tersebut sesuai dengan Surat No. 135/3182. Yang menjelaskan bahwa berdasarkan penjelasan pasal 4 ayat (4) Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah bahwa pemekaran suatu Provinsi/Kabupaten/Kota dihitung dari minimal usia Penyelenggara Pemerintah untuk Provinsi 10 tahun, Kab/Kota 7 Tahun dan Kecamatan 5 Tahun Mengingat Kabupaten Buru baru dimekarkan dari Kabupaten Induk Maluku Tengah berdasarkan Undang-Undang No 46 Tahun 1999 oleh karena itu pengusulan pemekaran wilayah Kabupaten Buru Selatan baru dapat di proses pada tahun 2006 mendatang, namun hal ini tidak mengurangi semangat masyarakat untuk memperjuangkan Kabupaten Buru Selatan menjadi Daerah Otonom dan pada Awal tahun 2006 adalah sebagai langkah baru pemerintah daerah dan masyarakat meneruskan perjuangan untuk memekarkan Kabupaten Buru Selatan menjadi Kabupaten Baru sehingga pada Tanggal 21 Juli Tahun 2008 Kabupaten Buru Selatan resmi menjadi Kabupaten Baru di Provinsi Maluku

Hal ini Sesuai dengan adanya kemauan politik dari Pemerintah Daerah dan masyarakat Kabupaten Buru Selatan dengan tersedianya potensi sumber daya alam dan kondisi geografis yang tidak efektif menjadi faktor utama masyarakat Kabupaten Buru Selatan menginginkan Kabupaten Buru Selatan segera dimekarkan menjadi Daerah Otonom, hal ini agar penyediaan fasilitas sarana dan prasarana oleh pemerintah daerah setelah pemekaran wilayah dapat terpenuhi seperti pembangunan Rumah sakit, Sekolah-sekolah, jalan penghubung antar kecamatan, Transportasi umum, dan fasilitas lainnya yang menyangkut dengan kepentingan